

**JURNAL SKRIPSI**

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA  
DALAM MENJALANKAN PROGRAM BIMBINGAN TERHADAP ANAK  
PIDANA YANG MENDAPATPEMBEBASAN BERSYARAT**



**Disusun oleh :**

**RIKA LASMARITO SINAGA**

**NPM : 110510611**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA  
DALAM MENJALANKAN PROGRAM BIMBINGAN TERHADAP ANAK  
PIDANA YANG MENDAPATPEMBEBASAN BERSYARAT**



**Diajukan oleh :**

**RIKA LASMARITO SINAGA**

**NPM : 110510611**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui,**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 19 January 2015**

**Dosen Pembimbing,**

**G. Aryadi, SH.,MH.**

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA  
DALAM MENJALANKAN PROGRAM BIMBINGAN TERHADAP ANAK  
PIDANA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT**

**Rika Lasmarito Sinaga, G.Aryadi, SH.,MH.**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

This research explains about the roles of the Class 1 Yogyakarta Correctional Facility in applying the guidance program toward the criminal children who get the conditional release. Nowadays, the crimes conducted by the children have highly increased. Thus, those children should be handled differently from the adults by giving them guidance in the Correctional Facility. The purpose of this research is to obtain the data about the implementation of the guidance program by the Class 1 Yogyakarta Correctional Facility toward the criminal children who get the conditional release. The method used in this research is the normative law method; that is the use of the secondary data as the main data in the form of primary, secondary and tertiary law materials. The data analysis uses the qualitative method and the deductive framework (general – specific). The result of this research shows that the implementation of the guidance program toward the criminal children who get the conditional release consists of 5 (five) training materials: the guidance toward religion, the guidance on country awareness, the guidance on legal awareness, the guidance on self-autonomy, and the social and

mental guidance. As for the obstacles, there are the inadequate facilities and infrastructure, the limited budget, the residential locations of the criminal children which are unreachable by the staff of Class 1 Yogyakarta Correctional Facility.

**Keywords :** *Correctional Facility, the guidance program, the criminal children, the conditional release*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Setiap orang berpotensi sebagai pelaku kejahatan, tidak mengenal jenis kelamin pria atau wanita, dewasa maupun anak-anak. Masyarakat menganggap siapapun pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, maupun usianya, agar setiap pelaku kejahatan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di zaman sekarang ini kejahatan yang dilakukan anak jumlahnya meningkat. Laporan Komnas Perlindungan Anak, mengemukakan bahwa sebanyak 3.023 kasus pelanggaran hak anak terjadi di Indonesia, dan 58 % atau 1.620 anak menjadi korban kejahatan seksual. Hal itu meningkat tajam dibandingkan data pada tahun 2012 mencapai 60 %. Dilihat dari klasifikasi usia, dari 3.023 kasus tersebut, sebanyak 1.291 kasus (45 %) terjadi pada anak berusia 13 – 17 tahun, korban berusia 6 – 12 tahun sebanyak 757 kasus (26 %) dan korban usia 0 – 5 tahun sebanyak 849 kasus (29 %).<sup>1</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum disebabkan

---

<sup>1</sup><http://www.balitbangham.go.id/index.php/component/content/?view=featured&start=5>. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2014, Jam 14.30.

oleh faktor seperti dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagai orang tua, lingkungan tempat tinggal, yang telah membawa pengaruh terhadap sifat, serta ciri-ciri dan pelaku sosial dalam kehidupan masyarakat.

Anak penting karena merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.<sup>2</sup> Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sampai mengarah pada kriminalitas, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Masa anak-anak adalah masayang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.<sup>3</sup> Bagi anak yang melakukan tindak pidana akan diberi tindakan pidana yaitu pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta. Hlm. 1.

<sup>3</sup>M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Jakarta Timur. Hlm. 4.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Balai pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya. Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan salah satunya terhadap Anak Pidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

Cuti Bersyarat). Penting karena berdasarkan hal tersebut itu penulis akan meneliti Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menjalankan Program Bimbingan terhadap Anak Pidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat, khususnya di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta.

A. Rumusan Permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat?
2. Apa kendala yang dialami BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat?

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TERHADAP ANAK PIDANA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT SERTA KENDALANYA**

#### **Pengertian Pidana**

Pengertian pidana (*straf*) dalam arti terminologi yaitu hukum yang dijatuhkan terhadap yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.<sup>4</sup> Soedarto mengemukakan pengertian pidana bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup> Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan

---

<sup>4</sup>Andi Hamza, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 119.

<sup>5</sup>Dwidja Priyatno, 2006, *Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hlm. 7.

negara pada pembuat delik itu.<sup>6</sup>Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu menjadi jera.<sup>7</sup>

### **Pengertian Anak Pidana**

Pengertian pidana anak (*kinderstraf*) dalam arti terminologi adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.<sup>8</sup> Ruang lingkup pengaturan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 angka 3). Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3). Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa (Penjelasan Pasal 20).

### **Pembebasan Bersyarat**

Pengertian pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling; probation*) (KUHAP 276) dalam arti terminologi yaitu pidana yang dijatuhkan, tetapi yang tidak dilaksanakan, jika terpidana dalam masa pencobaannya tidak melanggar syarat umum, atau syarat khusus yang

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Ninie suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.Hlm. 11.

<sup>8</sup>Andi Hamza, *op cit*. Hlm. 120



ditentukan oleh hakim.<sup>9</sup> Pemberian bersyarat merupakan suatu keharusan tetapi harus memenuhi syarat, karena pelepasan bersyarat bukan hadiah tapi bagian integral dari proses pemasyarakatan yang kita anut sejak tahun 1964.<sup>10</sup>

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga menegaskan pengertian pembebasan bersyarat yaitu proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

### **Pelaksanaan Program Bimbingan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat**

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY. Salah satu fungsi dari

---

<sup>9</sup>Andi Hamza, *op cit.* Hlm. 120

<sup>10</sup>Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 59.

BAPAS Yogyakarta adalah melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap klien Pemasyarakatan. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu: klien anak dan klien dewasa. Pembimbingan oleh BAPAS salah satunya dilakukan terhadap Anak Pidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB).

Adapun anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat yang menjadi klien anak BAPAS Yogyakarta antara lain:

**Tabel 1**  
**Data Klien Anak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta**  
**Bulan Januari s/d Agustus 2014**

| No. | Bulan    | Nama Klien                                 | Jenis Kelamin |   |
|-----|----------|--|---------------|---|
|     |          |  | L             | P |
| 1.  | Januari  | Yuniardi Tri Awasto                        | L             |   |
| 2.  | Februari | Muhammad Noor Cholis Ardi Putra            | L             |   |
| 3.  | Maret    | Rizki Khoirul Huda alias Demit Bin Murtijo | L             |   |
| 4.  | April    | Avip Surya Peravira                        | L             |   |
| 5.  | Mei      | Belza Alfiananda                           | P             |   |
| 6.  | Juni     | Muhamad Sholeh Suryanto                    | L             |   |
| 7.  | Juli     | Muhamad Arief Nugroho                      | L             |   |
| 8.  | Agustus  | Mumahad Sudrajad Widarso alias Brajat      | L             |   |

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa klien anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat BAPAS Yogyakarta pada bulan

Januari sampai dengan Agustus sebanyak 8 klien anak, dimana yang klien anak yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 klien anak dan klien anak yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 klien anak. Setiap bulannya hanya ada satu klien anak yang dibawa pengawasan dan bimbingan BAPAS Yogyakarta.

Klien anak yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan BAPAS Yogyakarta melakukan berbagai macam tindak pidana. Ada pun jenis tindak pidana yang dilakukan klien anak BAPAS Yogyakarta antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Klien Anak BAPAS Yogyakarta**  
**Bulan Januari s/d Agustus 2014**

| No           | Jenis Tindak Pidana  | Jenis Kelamin |   | Jumlah   |
|--------------|--|---------------|---|----------|
|              |  | L             | P |          |
| 1            | Pencurian, Pasal 363 KUHP  |               | L | 3        |
| 2            | Ancaman Persetubuhan, Pasal 76D, UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak |               | L | 4        |
| 3            | Narkotika, Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009                                       |               | P | 1        |
| <b>Total</b> |  |               |   | <b>8</b> |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah klien anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 klien anak, tindak pidana persetubuhan sebanyak 4 klien anak, dan tindak pidana narkotika sebanyak 1 klien anak dimana dilakukan oleh klien anak berjenis kelamin perempuan dan tindak pidana pencurian serta persetubuhan dilakukan oleh klien anak berjenis kelamin laki-laki.

Klien anak yang melakukan tindak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat diawasi dan dibimbing oleh petugas BAPAS Yogyakarta. Adapun masa bimbingan klien anak yaitu:

**Tabel 3**  
**Masa Bimbingan dan Pembimbing Kemasyarakatan**

| No | Nama Klien                                 | Tindak Pidana   | Masa Bimbingan                    | Pembimbing Kemasyarakatan |
|----|--|---|-----------------------------------|---------------------------|
| 1  | Yuniardi Tri Awasto                        | Pencurian,<br>Pasal 363 KUHP  | 29 Januari 2014 s/d 12 Juni 2015  | Drs. Jati W               |
| 2  | Muhammad Noor Cholis Ardi Putra.           | Ancaman Persetubuhan,<br>Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak | 28 April 2014 s/d 18 Agustus 2015 | Sri Akhadyanti            |
| 3  | Rizki Khoirul Huda alias Demit Bin Murtijo | Ancaman Persetubuhan,<br>Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak | 28 Mei 2014 s/d 03 Mei 2016       | Ika Pawestri              |
| 4  | Avip Surya Peravira                        | Ancaman Persetubuhan,<br>Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  | 13 Juni 2014 s/d 03 Mei 2016      | Ika Pawestri              |
| 5  | Belza Alfiananda                           | Narkotika,<br>Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009                                       | 17 Juni 2014 s/d 21 Agustus 2016  | Endang W                  |
| 6  | Muhamad Sholeh Suryanto                    | Ancaman Persetubuhan,<br>Pasal 76D UU RI No.35  | 2 Agustus 2014 s/d 13 Mei 2017    | Rusmiyati                 |

|   |  |  |   |              |
|---|--|--|---|--------------|
|   |  | Tahun<br>2014tentang<br>Perlindungan<br>Anak |   |              |
| 7 | Muhamad<br>Arief Nugroho                       | Pencurian,<br>Pasal 363<br>KUHP              | 25 Agustus<br>2014 s/d 21<br>January 2016 | Ika Pawestri |
| 8 | Mumahad<br>Sudrajad<br>Widarso alias<br>Brajat | Pencurian,<br>Pasal 365<br>KUHP              | 25 Agustus<br>2014 s/d 29<br>Oktober 2014 | Fanani       |

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, klien anak yang dibawah pengawasan dan bimbingan petugas BAPAS Yogyakarta memiliki masa bimbingan yang berbeda-beda meskipun klien anak melakukan tindak pidana yang sama. Dan petugas pembimbingan yaitu pegawai BAPAS Yogyakarta disesuaikan dengan klien anak yang akan diberi pengawasan dan pembimbingan.

Ada 5 materi pelatihan yang diberikan oleh BAPAS Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan, yaitu:

#### 1. Bimbingan Agama

Memberikan bimbingan agama Pembimbing Kemasyarakatan menyuruh si anak untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Tidak hanya menyuruh tetapi juga memantau dan memberikan arahan atau penyuluhan kerohanian kepada klien anak.

#### 2. Bimbingan Kesadaran bernegara

Memberikan bimbingan kesadaran bernegara si anak diberi pengertian berperilaku baik di masyarakat supaya di senangi dan diterima baik di dalam masyarakat. Diberi arahan bagaimana bersikap dan berperilaku yang

baik. Diberi nasehat supaya berbakti kepada nusa dan bangsa. Di ajak upacara bendera bersama, misalnya pada tanggal 17 Agustus hari Kemerdekaan, hari jadi Balai Pemasarakatan.

### 3. Bimbingan Kesadaran hukum

Bimbingan kesadaran hukum hampir sama pemberian bimbingannya dengan kesadaran bernegara. Pembimbing memberikan pengertian dan arahan kepada si anak supaya berperilaku baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya.

### 4. Bimbingan Kemandirian (berupa pelatihan keterampilan dan kursus-kursus)

Bimbingan kemandirian BAPAS Yogyakarta dikondisikan kepada sosial dan ekonomi si anak. Jika ekonomi dan sosial si anak sulit akan diikuti sertakan ke pelatihan di Jejaring Sosial Dinas Provinsi DIY Program Narapidana yang sifatnya menambah keterampilan dan sekaligus menambah modal usaha. Contohnya : perbengkelan dan tataboga. Klien anak akan mendapat keterampilan dari dinas sosial, jika perkembangannya baik akan dikasih modal dari dinas sosial, dan tetap dalam pantauan. Jika perkembangannya semakin baik akan dikasih modal lagi oleh dinas sosial. Macam jenis keterampilan tergantung pihak Dinas Sosial. Selain itu, BAPAS Yogyakarta memberikan beasiswa kepada anak tidak mampu, pelajar aktif dan berumur dibawah 18 tahun dengan cara BAPAS Yogyakarta mendaftarkan ke Dinas Sosial. Setahun sekali si anak akan

mendapat 1 ½ juta secara berkelanjutan. Tetapi pada tahun ini berkurang menjadi 1 juta karena kurangnya anggaran. Harapannya semoga meningkat.

#### 5. Bimbingan Sosial dan Mental

Pembimbing BAPAS Yogyakarta memberikan bimbingan sosial dan mental kepada anak. Menanyakan klien anak bagaimana perkembangannya dengan lingkungannya, apakah ada masalah atau tidak, memberikan solusi atau saran agar bersikap yang baik supaya dapat diterima baik oleh masyarakat.

#### **Kendala Yang Dialami BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam Menjalankan Program Bimbingan**

##### 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasana yang kurang memadai dalam menjalankan program bimbingan. Seperti dalam hal fasilitas kendaraan yang tidak tersedia di BAPAS Yogyakarta. Dalam melaksanakan bimbingan mengunjungi rumah klien anak sehingga pegawai harus menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum, fasilitas didalam kantor klien anak yang hanya ada satu komputer, pegawai dalam bertugas terkendala, apalagi setelah dikeluarkannya undang-undang yang baru tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menuntut penyelesaian Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dalam 3 hari.

##### 2. Terbatasnya Anggaran

Anggaran yang diperoleh BAPAS Yogyakarta dari pemerintah untuk melaksanakan menjalankan program bimbingan terhadap klien tidak seimbang dengan apa yang dibutuhkan/diperlukan. Apalagi untuk tahun ini dana untuk program bimbingan khusus klien anak tidak ada dikarenakan anggarannya berkurang.

3. Lokasi tempat tinggal klien anak

Lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil membuat pegawai BAPAS Yogyakarta sulit untuk menjangkau dengan kendaraan umum. Dan alamat yang kurang lengkap dan jelas yang dicatat yang diberikan oleh klien anak sehingga petugas mengalami kesulitan untuk melakukan kunjungan.

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan program bimbingan yang diberikan BAPAS Yogyakarta terhadap Anak Pidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat, yaitu dengan cara: a) Menjalankan 5 materi pelatihan yaitu bimbingan agama, bimbingan kesadaran bernegara, bimbingan kesadaran hukum, bimbingan kemandirian (berupa pelatihan keterampilan dan kursus-kursus), dan bimbingan sosial dan mental. b) Bentuk pelaksanaan program bimbingan, ada 2 yaitu : berkelompok dan individu
- a. Kendala yang dihadapi BAPAS Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan terhadap anak pidana adalah sebagai berikut: a) Sarana dan prasarana yang kurang memadai. b) Terbatasnya Anggaran. c) Lokasi



tempat tinggal klien anak yang jauh dan sulit terjangkau. d) Kesulitan menyesuaikan waktu melaksanakan program bimbingan bentuk kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamza, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Jakarta Timur
- Ninie suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

### Website

<http://www.balitbangham.go.id/index.php/component/content/?view=featured&start=5>. Di akses pada tanggl 20 Oktober 2014, Jam 14.30.